

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gizi merupakan hal yang penting bagi kesehatan dan perkembangan yang disebutkan oleh *World Health Organization* (WHO) (Nutrisi, t.thn.). Dengan kondisi gizi yang baik dan cukup, manusia dapat melakukan aktivitas secara produktif dibandingkan dengan orang yang kekurangan gizi. Gizi yang cukup mempengaruhi kinerja otak pada anak – anak yang berada pada tahap pembelajaran, sehingga anak dengan gizi yang cukup dapat belajar dengan baik di sekolah. Pemenuhan gizi pada anak usia dini dan anak pada usia aktif belajar dipenuhi melalui sarapan. Pada survei yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI melalui Data Survei Diet Total (SDT) tahun 2020, menunjukkan dari 25.000 anak dalam taraf usia 6 – 12 tahun yang berada pada 34 provinsi terdapat 47,7 persen anak belum terpenuhi kebutuhan energinya pada saat sarapan. Selain itu, 66,8 persen anak sarapan dengan gizi yang rendah sehingga kebutuhan gizi mereka tidak terpenuhi terlebih pada asupan vitamin dan mineral (Puspa, 2022).

Anak – anak yang berada pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) berada pada masa pertumbuhan yang sangat aktif. Selain itu berbagai kegiatan fisik yang terjadi pada masa pembelajaran

mereka di institusi pendidikan dasar juga menguras tenaga sehingga mereka membutuhkan tambahan energi. Dengan dua indikator diatas, keterbutuhan gizi pada anak usia pendidikan dasar sangat dibutuhkan untuk menopang mereka menjadi manusia yang kuat, aktif, serta mampu untuk beradaptasi di masa pembelajaran dasar. Namun, sayangnya tidak semua keluarga mampu untuk menjamin keterbutuhan gizi bagi anaknya yang berada pada usia pendidikan dasar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait dengan kecukupan gizi belum secara keseluruhan dipahami oleh masyarakat. Kondisi ekonomi dan pengetahuan tentang gizi ini yang menyebabkan terhambatnya perkembangan anak usia pendidikan dasar kurang tercukupi gizinya.

Melihat problematika gizi pada anak usia pendidikan dasar, pemerintah Indonesia merespon masalah ini dengan serius melalui program PMT-AS (Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah). Program ini dituangkan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2011 tentang pedoman penyediaan makanan tambahan anak sekolah. Peraturan ini dibuat sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi anak sekolah, khususnya dari golongan keluarga yang tidak mampu PMT-AS yang disebutkan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2011 ini merupakan kegiatan yang memberikan makanan berbentuk jajanan/kudapan atau bahkan makanan lengkap yang bergizi kepada anak sekolah usia dasar yang dalam ini yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dasar) dan setingkatnya, serta SD (Sekolah Dasar) dan setingkatnya. Dengan diturunkannya permendagri ini, harapannya

menjadi pedoman daerah untuk mengembangkan pertumbuhan anak melalui PMT-AS di masing – masing daerah di Indonesia.

Meskipun Jakarta sebagai ibu kota dari negara Indonesia, bukan berarti wilayah ini terlepas dari permasalahan gizi yang kerap menghantui anak sekolah. Walaupun dengan sumber daya, akses, dan edukasi yang sudah cukup mumpuni, namun masih banyak orang tua di Jakarta yang belum berkecukupan untuk memberikan makanan bergizi bagi putra putrinya. Pada saat Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan periode 2017 – 2022, ia mengatakan bahwa setidaknya di tahun 2019 terdapat lebih dari 30 persen siswa di Jakarta yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Angka yang cukup besar bagi wilayah sekelas ibu kota negara dalam permasalahan gizi bagi anak sekolah. Permasalahannya tidak jauh dari kondisi ekonomi dari tiap – tiap keluarga yang tidak cukup mumpuni untuk memberikan sarapan bergizi untuk anaknya yang berada pada masa sekolah dasar (Anies Baswedan Team, 2023).

Pemerintah provinsi Jakarta pada tahun 2019 meluncurkan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah atau yang disingkat PMT-AS dalam rangka mengentaskan gizi buruk yang terjadi di kalangan anak sekolah. Program ini diluncurkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 9 Tahun 2019. Pergub ini diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 dan mulai efektif berlaku sejak 06 Februari 2019. Dalam pergub ini mengatur tentang penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah yang tersedia dalam bentuk jajanan atau makanan lengkap. Tidak hanya mengatur tentang kegiatan, pergub ini juga

memperhatikan mengenai mutu, kesehatan, keamanan pangan, serta pemberdayaan dalam masyarakat.

Pelaksanaan PMT-AS di Jakarta sedikit unik karena menggandeng orang tua siswa dari sekolah dalam hal menyediakan makanan untuk anak – anak. Melalui komite sekolah, orang tua bekerja sama mulai dari mengelola uang yang diberikan, belanja bahan, memasak, hingga akhirnya dibagikan kepada anak – anak di sekolah. Koordinasi kegiatan PMT-AS dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta melalui perpanjangan tangan kepada suku dinas di tiap – tiap wilayah. Selain itu, ada peran dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka mengawasi peredaran makanan bergizi ini kepada siswa di sekolah (Setya, 2022).

Sasaran dari program PMT-AS di Jakarta melingkupi anak – anak sekolah yang berada pada usia dasar. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN). Makanan yang diberikan kepada siswa bervariasi namun menyesuaikan mutu dan gizi yang telah diarahkan oleh badan terkait. Terdapat 29 jenis makanan mulai dari makanan lengkap, jajanan, dan buah yang disediakan oleh para orang tua murid yang tergabung dalam tim PMT-AS ini, dan divariasikan setiap harinya. Anggaran sebesar Rp. 10.890,- per anak dengan total 324 miliar rupiah dikucurkan melalui APBD Jakarta. Tahun 2019, terhitung PMT-AS telah dirasakan oleh 144.722 anak sekolah dari 459 instansi pendidikan dasar yang berada di Jakarta (Amana, 2019).

Pemerintah Walikota Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah yang mengerjakan kebijakan PMT-AS. Melalui arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan sebagai penanggung jawab utama pada program ini di wilayah Jakarta Selatan. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan terbagi menjadi dua yaitu wilayah 1 dan wilayah 2, masing – masing mengkoordinir sekolah – sekolah yang berada di wilayahnya dalam melaksanakan program PMT-AS ini. Suku Dinas Pendidikan baik wilayah 1 dan wilayah 2 berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Selatan mewujudkan agar program ini berjalan dengan sesuai.

Program sepenting dan sebesar ini tentunya tidak terlepas dari masalah, apalagi ini menyangkut anggaran yang besar dan koordinasi antar pihak yang luas. Permasalahan utama dari program ini adalah terhalang pada waktu pandemi Covid – 19 yang menyebabkan terhentinya program ini sementara selama 2 tahun. Setelah masa pandemi dan memasuki masa *new normal*, PMT-AS kembali dijalankan dengan keterbatasan seminggu sekali di setiap hari Rabu. Selain dari masalah terkendala akibat pandemi, terdapat problematika lain selama program ini berjalan di Jakarta Selatan, seperti sulitnya ketersediaan pangan dengan harga yang murah akibat anggaran yang terbatas. Akibat dari pengelolaan anggaran yang diserahkan kepada pihak orang tua melalui komite sekolah, muncul permasalahan lain seperti adanya indikasi

penyelewengan dana baik dari pihak orang tua murid maupun dari pihak sekolah.

Dalam konteks PMT-AS di Jakarta Selatan, penerapan prinsip - prinsip *collaborative governance* dapat dilihat dalam upaya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sekolah-sekolah sebagai mitra pelaksana program. Melalui forum-forum konsultasi dan kerjasama, berbagai pihak bekerja sama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program PMT-AS untuk mencapai hasil yang maksimal. Kerja sama antar berbagai pihak yang berkepentingan agar program ini dapat terlaksana tanpa adanya suatu permasalahan yang besar. Selain itu tidak lupa pula pemerintah walikota Jakarta Selatan yang turut melibatkan berbagai aktor atau *stakeholders* dalam menjamin program ini terlaksana hingga tuntas. Program PMT-AS juga merupakan program besar dari pemerintah walikota Jakarta Selatan dalam hal melibatkan masyarakat sipil yang kali ini diwakili oleh orang tua murid dalam naungan komite sekolah.

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam manajemen kebijakan yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Ansell dan Gash, 2008). Pemerintah walikota Jakarta Selatan menerapkan prinsip *collaborative governance* dalam pelaksanaan program PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan-Anak Sekolah) untuk

mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak usia sekolah. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja bersama secara efektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program.

Program PMT-AS bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak di sekolah dasar dan PAUD dengan menyediakan makanan tambahan yang bergizi. Melalui pendekatan *collaborative governance*, pemerintah walikota Jakarta Selatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap pelaksanaan program. Pemerintah berkolaborasi dengan LSM yang berfokus pada kesehatan dan gizi anak untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya nutrisi. Sektor swasta juga dilibatkan untuk membantu dalam penyediaan bahan makanan yang berkualitas dan mendukung logistik program. Selain itu, partisipasi masyarakat dan orang tua siswa diupayakan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan makan anak-anak.

Kerjasama lintas sektor ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program PMT-AS, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti masalah pendanaan, distribusi, dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Dengan melibatkan berbagai aktor, pemerintah dapat mengumpulkan beragam perspektif dan sumber daya, yang pada gilirannya memperkuat pelaksanaan program dan meningkatkan dampaknya terhadap kesehatan dan gizi anak-anak. Selain itu,

pendekatan collaborative governance dalam PMT-AS juga mendorong akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Evaluasi bersama oleh pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif dan perbaikan berkelanjutan dalam program.

Melalui penerapan collaborative governance, pemerintah walikota Jakarta Selatan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara holistik. Keberhasilan program PMT-AS di Jakarta Selatan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengatasi masalah gizi anak-anak melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Dengan demikian, collaborative governance tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam upaya peningkatan kesehatan publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Selatan, sektor swasta, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan PMT-AS di Jakarta Selatan periode 2019-2023?

2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan PMT-AS di Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis proses kolaborasi antara pemerintah walikota Jakarta Selatan, sektor swasta, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan PMT-AS. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan PMT-AS di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas, manfaat yang diharapkan oleh penulis meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan keilmuan. Penulis juga berharap penelitian ini mampu untuk berkontribusi dalam bidang pengetahuan *collaborative governance* terkhusus mengenai kebijakan PMT-AS baik itu di Jakarta Selatan maupun di daerah lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

- A. Bagi peneliti, dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan mampu untuk mengetahui secara nyata proses *collaborative governance* dalam penerapan kebijakan PMT-AS di Jakarta Selatan dan dampaknya dari penerapan *collaborative governance* pada kebijakan tersebut. Sehingga harapannya, penelitian ini dapat menjadi acuan di kemudian hari bagi pemerintah provinsi Jakarta atau lainnya agar ketika menerapkan *collaborative governance* pada kebijakan lainnya dapat berjalan lebih optimal serta implikasinya dapat dirasakan secara lebih matang.
- B. Bagi kampus, diharapkan dapat menambah kajian keilmuan terkait dengan *collaborative governance* dan kebijakan PMT-AS. Penelitian ini juga akan menjadi tambahan literatur terkait dengan keilmuan yang ada pada penelitian ini.
- C. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber bacaan, kajian ilmiah, dan literatur yang berisi untuk dapat membantu mengkaji sebuah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *collaborative governance* dan kebijakan PMT-AS di berbagai daerah di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penyusunan proposal skripsi ini tentunya peneliti akan menggunakan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan keilmuan dan teori untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun proposal skripsi ini. Dengan melihat dan menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan, akan menjadi pembanding dan pendukung dalam mengkaji lebih dalam terkait penelitian ini. Hasil yang ditemukan dalam penelitian terdahulu menjadi pisau analisis terkait apakah ada perbedaan atau bahkan persamaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan kejadian aktual yang nanti akan ditemui di lapangan.

Penelitian pertama yang akan dimasukkan peneliti kedalam proposal skripsi ini adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Rahayu Widaryanti, Casnuri, dan Metty dari Universitas Respati Yogyakarta dengan judul *Penurunan Masalah Gizi Pada Anak Usia Dini Melalui Edukasi PMT-AS*. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sleman dengan fokus masalah tentang malnutrisi dan obesitas yang terjadi, faktor yang mempengaruhi adalah terkait perilaku konsumtif orang tua dalam menyediakan makanan bagi anak dengan makanan cepat saji. Permasalahan ini menarik para penulis untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Penelitian ini menghasilkan tiga solusi yang diterapkan pada Desa Purwomartani, Sleman melalui pendidikan,

pendampingan, dan kegiatan. Sasarannya adalah guru PAUD dan orang tua murid di Desa Purwomartani.

Pertama, mereka memberikan edukasi mengenai komposisi makanan yang sesuai untuk anak, selain itu mereka juga memberikan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui hasil perkembangan pengetahuan para warga. Kedua, mereka melakukan pendampingan yang bertujuan untuk mengetahui masalah gizi pada anak sekolah di Desa dan pendampingan penyusunan menu – menu yang bergizi seimbang. Ketiga, mereka melakukan praktek yang melibatkan orang tua murid dan guru PAUD dalam menyusun dan menyiapkan menu makanan dengan gizi seimbang kepada anak murid PAUD. Kesimpulannya, program edukasi PMT-AS ini berhasil untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para guru dan orang tua murid dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak – anaknya. Kegiatan ini juga berhasil untuk mengurangi masalah gizi pada anak usia dini melalui pendekatan partisipatif serta keberlanjutan melalui monitoring oleh para *stakeholders* terkait (Widaryanti, Casnuri, & Metty, 2022).

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Ira Endah Rohima dengan judul *Kajian Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) di Bandung*. Penelitian ini berlokasi di Kota dan Kabupaten Bandung dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan gizi yang terjadi serta meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya di anak sekolah dasar dengan cara intervensi gizi. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi

hasil dari kinerja PMT-AS yang diterapkan di Bandung dan menilai persepsi dari kedua belah pihak yang terlibat yaitu sekolah dan masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan melalui survei kepada 54 orang yang terdiri dari berbagai macam *stakeholders* yaitu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja PMT-AS secara input, proses sudah cukup baik dalam kinerja. Masing – masing pihak sudah cukup bekerja secara maksimal demi mewujudkan hasil positif dari program PMT-AS ini. Namun, jika ditinjau secara hasil, hasil yang diharapkan hanya menunjukkan perbedaan sedikit dan tidak terlalu signifikan pada hasil sebelum dan sesudah adanya program PMT-AS ini. Hasil dari persepsi dari kedua belah pihak yaitu sekolah dan masyarakat mengatakan bahwa program ini baik dan tidak menjadi beban bagi pihak yang terlibat di PMT-AS. Pihak sekolah dan masyarakat pun mengharapkan program ini dapat menjadi program ini dapat berlanjut dan menjadi program yang diperlukan bagi masyarakat khususnya anak – anak sekolah usia dasar (Rohima, 2016).

Penelitian ketiga dengan judul *Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Berbasis Pangan Lokal dalam Meningkatkan Status Gizi Siswa Sekolah Dasar Negeri Batuinan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang* ditulis oleh Maria Helena D. Nita, Meirina S. Loaloka, Maria Goreti Pantaleon, dan Christina Rosanti Nenotek. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa di NTT prevalensi stunting sebesar 42,6% dan gizi kurang sebesar

29,5%. Secara penelitian, gizi seimbang sangat penting pada masa pertumbuhan secara optimal anak dan malnutrisi pada masa emas pertumbuhan yang menyebabkan stunting. Lokasi penelitian ini berada pada salah satu SD yang berada di NTT, tepatnya di SDN Batuinan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang yaitu salah satu sekolah dasar yang memiliki masalah gizi khususnya kekurangan protein.

Penelitian ini didasari kondisi aktual dari masyarakat di daerah Semau yang terbatas oleh pendidikan, ekonomi, serta akses pangan yang masih minim. Peneliti berusaha untuk mengembangkan makanan lokal yang menjadi makanan sehari – hari warga untuk menjadi makanan bergizi dan tentunya dengan partisipasi warga serta memanfaatkan sumber daya sekitar. Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengabdian melalui edukasi dan praktek kepada 30 siswa SDN Baitunan pada September hingga November tahun 2021. Edukasi dan praktek yang dilakukan mencakup penggunaan bahan pangan lokal seperti tempe dan ikan untuk dijadikan nugget yang diminati oleh anak usia dini. Hasil dari penelitian ini hanya menunjukkan potensi peningkatan pengetahuan dan status gizi pada anak sekolah usia dasar pada program PMT-AS berbasis pangan lokal (Nita, Loaloka, Pantaleon, & Nenotek, 2021).

Berikutnya penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Tantriarti dan Risky Setiawan dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Usia Dini*. Penelitian ini melihat bahwa malnutrisi menjadi masalah kesehatan yang sering kali terjadi di

negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program PMT di TK Bakti Baitussalam, Kecamatan Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi selama program ini dilaksanakan. Evaluasi yang ingin dilihat dari penelitian ini menggunakan model *input, process, dan product*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan keterbatasan dana menjadi masalah utama dari keberjalanan program PMT, sehingga bahan makanan yang diberikan terbatas ppada buah, sayur dan telur. Selain itu, masalah lainnya adalah anak – anak yang kurang menyukai sayur pada makanan PMT yang telah disajikan. Program ini secara proses telah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, program ini juga telah membantu membiasakan anak untuk hidup sehat walaupun program ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh anak – anak (Tantriarti & Setiawan, 2023).

Penelitian kelima yang relevan untuk dikaji adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Rahma Putri Khasanah dan Titin Purwaningsih (2021) dengan judul "Analisis Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Psbb Pada Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance selama implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama di DKI Jakarta. Latar belakang penelitian ini adalah adanya keterbatasan sumber daya pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi, sehingga kolaborasi

dengan berbagai pihak menjadi instrumen yang sangat diperlukan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi dari George C. Edward III untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan PSBB. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antar instansi pemerintah, program bantuan sosial seperti Bansos dan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), serta peran aktif dari organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah melalui MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Centre). Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan signifikan. Hambatan utama berasal dari aspek komunikasi yang timpang tindh antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sikap pelaksana di tingkat pusat yang dinilai kurang responsif dan cenderung lamban, serta masalah dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat data yang kurang akurat dan pengawasan yang minim (Khasanah & Purwaningsih, 2021).

Kelebihan dari penelitian ini adalah kemampuannya dalam memetakan secara komprehensif berbagai aktor yang terlibat dalam penanganan krisis pada masa PSBB, mulai dari pemerintah hingga organisasi masyarakat. Akan tetapi, kekurangan penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang digunakan. Dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III, fokus analisisnya lebih pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dari atas ke bawah (*top-down*), dan belum secara mendalam mengupas *dinamika proses*

kolaborasi itu sendiri—seperti proses pembangunan kepercayaan, dialog tatap muka, dan kepemimpinan fasilitatif—sebagaimana yang menjadi fokus dalam kerangka teori Ansell dan Gash yang digunakan dalam skripsi ini.

Penelitian keenam yang digunakan sebagai acuan adalah artikel jurnal karya Andre Ariesmansyah, R. Hari Busthomi Ariffin, dan Luthfi Ardhia Respati (2023) dengan judul “Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Patengan, Kabupaten Bandung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Menariknya, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori yang sama, yaitu model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash untuk menganalisis fenomenanya.

Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Patengan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator kolaborasi yang tidak tercapai, di antaranya adalah belum adanya aturan resmi yang mengikat para aktor, permasalahan pada aspek kepemimpinan dan kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya kepercayaan (*trust*) antar pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor penghambatnya meliputi aspek budaya, institusi, dan politik (Ariesmansyah, Ariffin, & Respati, 2023).

Kelebihan utama penelitian ini adalah relevansinya yang sangat tinggi, baik dari segi tema maupun kerangka teori yang sama-sama digunakan, sehingga menjadi pembanding yang kuat. Namun, penelitian ini lebih banyak menyoroti kasus kegagalan atau ketidakefektifan kolaborasi, berbeda dengan skripsi ini yang menemukan adanya praktik kolaborasi yang adaptif dan tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian Ariesmansyah dkk. ini memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya *collaborative governance*, sementara skripsi ini memberikan gambaran tentang bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dalam konteks yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan mendasar antara skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada fokus mengenai implementasi kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian oleh Widaryanti dkk., Rohima, Nita dkk., serta Tantriarti dan Setiawan secara spesifik membahas kebijakan PMT-AS, namun dari sudut pandang yang berbeda seperti edukasi gizi, evaluasi program, dan pemanfaatan pangan lokal. Sementara itu, penelitian Khasanah dan Purwaningsih serta Ariesmansyah dkk. juga sama-sama mengangkat tema *collaborative governance*, meskipun dalam konteks kebijakan yang berbeda, yaitu penanganan pandemi Covid-19 dan pengembangan desa wisata.

Perbedaan utama sekaligus kelebihan penelitian ini terletak pada kedalaman dan sudut pandang analisisnya. Dibandingkan dengan empat penelitian pertama yang berfokus pada PMT-AS, skripsi ini tidak hanya melihat hasil atau evaluasi program, melainkan membedah proses tata kelola kolaboratifnya secara mendalam. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penelitian Khasanah dan Purwaningsih yang menggunakan teori implementasi George C. Edward III, penelitian ini menerapkan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash secara langsung. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih fokus pada dinamika interaktif seperti dialog, pembangunan kepercayaan, dan kepemimpinan fasilitatif, bukan sekadar faktor pendukung dan penghambat dari atas ke bawah.

Terakhir, jika dibandingkan dengan penelitian Ariesmansyah dkk. yang juga menggunakan teori Ansell dan Gash, penelitian ini menyajikan sebuah studi kasus yang kontras. Jika penelitian tersebut menyoroti kasus kegagalan kolaborasi, maka penelitian ini justru menganalisis sebuah praktik kolaborasi yang terbukti berjalan adaptif dan berhasil mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah dengan menyajikan analisis mendalam tentang *bagaimana* sebuah proses kolaborasi dalam kebijakan publik dapat berjalan secara efektif, menggunakan kerangka teori yang relevan untuk membedah dinamika yang terjadi antar aktor di dalamnya.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik berarti sebuah tindakan yang dilakukan dan diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* (1953) yang dikutip oleh (Abdoellah & Rusfiana, 2016) menerangkan bahwa kebijakan publik adalah nilai yang mempunyai otoritas bagi masyarakat secara keseluruhan, yang memiliki tindakan otoritatif hanyalah masyarakat serta semua yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang menjadi tugas pemerintah adalah hasil dari nilai tersebut.

Solichin Abdul Wahab (1991) kemudian menjadikan perspektif dari David Easton ini sebagai landasan untuk menjelaskan ciri – ciri dari kebijakan publik yang disusun oleh orang yang memiliki kewenangan dalam sistem pemerintahan, berikut merupakan ciri – ciri kebijakan publik yang dibuat oleh Solichin Abdul Wahab:

1. Kebijakan publik berfokus kepada tujuan yang terarah
2. Inti dari kebijakan itu sendiri terdiri pada tindakan pemerintah yang memiliki keterkaitan dan memiliki fokus pada tujuan tertentu

3. Kebijakan yang diimplementasikan berkaitan pada bidang tertentu yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta memiliki tindakan yang konkret
4. Kebijakan dapat berbuah pada hasil yang positif namun juga bisa berhasil negatif

Menurut Thomas R. Dye di bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy* (1972) yang dikutip pada (Abdullah & Rusfiana, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dalam Bahasa Inggrisnya yaitu “*public policy is whatever government chooses to do or not to do*”. Selain itu, Chief J.O Udoji (1981) dalam (Abdullah & Rusfiana, 2016) mengemukakan bahwa *public policy* adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan sanksi kepada tujuan tertentu dan diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

1.5.2.2 Collaborative Governance

Collaborative atau dalam Bahasa Indonesia adalah kolaborasi yang berarti sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan berbagai macam pihak untuk bahu membahu demi ketercapaiannya tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan *governance* menurut Rotberg (2004) berarti serangkaian usaha yang dilakukan untuk menjalankan sebuah negara, usaha ini bergantung pada *power*

yang digunakan oleh otoritas utama yaitu pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada dan menjaga hubungan antar berbagai pihak baik masyarakat maupun institusi lainnya (Rotberg, 2004).

Collaborative governance adalah sebuah upaya pemerintah untuk berkolaborasi bersama beberapa pihak baik itu dari institusi yang besar hingga kedalam institusi yang terkecil untuk dapat mewujudkan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam jurnalnya, Emerson et al. (2012) menerangkan bahwa *collaborative governance* didefinisikan sebagai struktur dan serangkaian cara proses pengambilan keputusan dan manajemen yang berkolaborasi dan melibatkan masyarakat secara konstruktif melewati batas institusi untuk dapat mengerjakan tujuan umum yang tidak akan dicapai apabila tidak dilakukan (Emerson, Nabatchi, & Stephen Balogh, 2012).

Terdapat pandangan lainnya dari Agranoff dan McGuire (2003) tentang *collaborative governance*, yaitu sebuah bentuk dalam memanfaatkan jaringan yang ada. *Collaborative governance* berarti memanfaatkan jaringan yang ada yaitu berbagai organisasi dan melibatkannya untuk mencapai hasil dan tujuan bersama. Dalam pemerintahan kolaboratif, Agranoff dan McGuire (2003) menekankan pada koordinasi dan integrasi dari masing – masing aktor dalam prosesnya (Agranoff & Michael McGuire, 2003).

Konsep *collaborative governance* yang paling terkenal adalah model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Menerangkan bahwa *collaborative governance* adalah pendekatan pada

manajemen kebijakan yang bertumpu pada kolaborasi dan kerjasama yang terjadi oleh berbagai aktor seperti organisasi non-pemerintah (LSM), swasta, dan masyarakat sipil, kerjasama ini dijalani oleh pemerintah mulai dari proses perumusan kebijakan hingga pada pelaksanaannya (Ansell & Gash, 2008). Dalam ilmu sosial, konsep yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash ini cukup penting dalam perkembangan studi. Konsep ini menjelaskan tentang pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif. *Collaborative governance* dikembangkan menjadi salah satu solusi bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang dapat menjawab permasalahan yang sifatnya hanya diketahui oleh aktor selain pemerintah.

Penting untuk digarisbawahi bahwa model *collaborative governance* yang ideal menurut Ansell dan Gash seringkali mengasumsikan bahwa inisiasi kolaborasi dan proses pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu masalah publik dilakukan secara kolektif sejak awal. Dalam kondisi ideal tersebut, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat duduk bersama sebagai mitra setara untuk mendefinisikan masalah, merumuskan tujuan, dan membangun komitmen bersama. Proses ini bersifat deliberatif dan berorientasi pada konsensus, di mana tidak ada satu pihak pun yang mendominasi pengambilan keputusan awal. Sehingga keputusan akan kebijakan yang ingin dijalankan diputuskan oleh semua aktor yang terlibat tanpa didominasi oleh pemerintah. Maka itulah inti dari *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash.

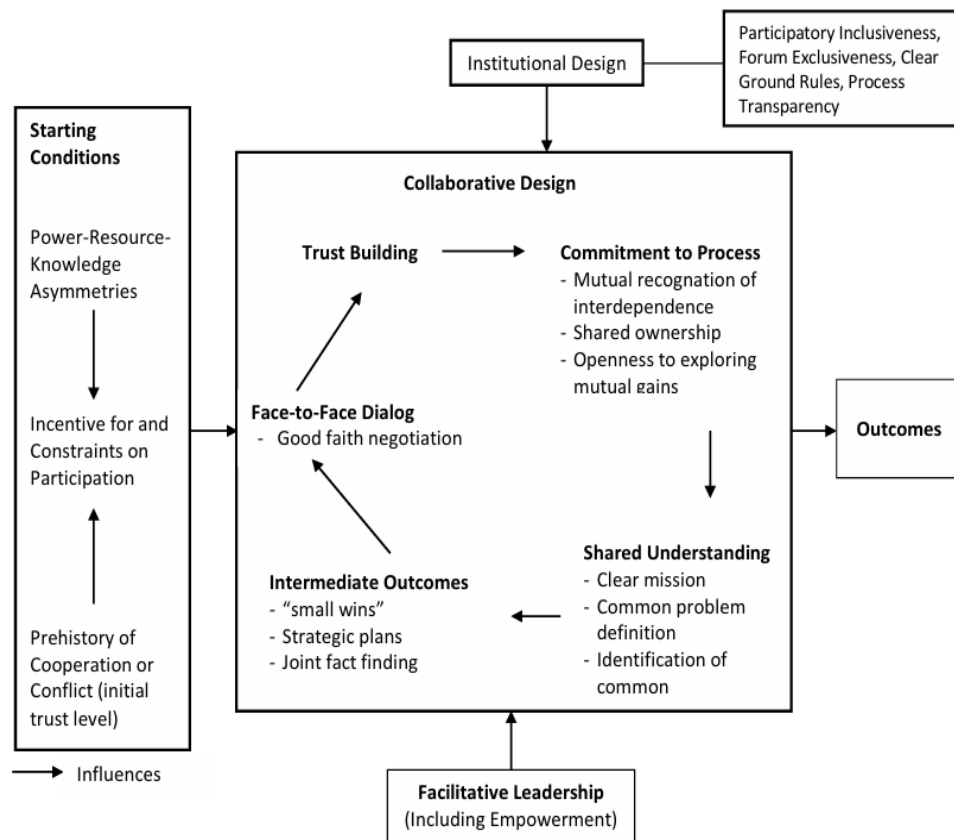
Sebagai perspektif pelengkap, R.A.W. Rhodes dalam karyanya "*Understanding Governance*" menawarkan pandangan yang sedikit berbeda. Rhodes melihat *governance* tidak hanya sebagai tindakan pemerintah, tetapi sebagai hasil dari interaksi antar berbagai aktor dalam sebuah jaringan kebijakan (*policy networks*). Dalam pandangan ini, pemerintah adalah salah satu dari banyak aktor yang saling bergantung. Fokus Rhodes pada 'jaringan' dan 'interaksi' ini relevan untuk memahami bahwa bahkan ketika sebuah kebijakan awal dirumuskan secara sepihak atau *top-down* oleh pemerintah, proses implementasinya secara tak terhindarkan akan memicu serangkaian interaksi, negosiasi, dan penyesuaian antar berbagai aktor di lapangan. Oleh karena itu, kerangka Rhodes membantu menjelaskan dinamika yang terjadi saat pemerintah, komite sekolah, dan pihak swasta mulai bekerja sama dalam pelaksanaan PMT-AS, meskipun keputusan awalnya tidak dibuat secara kolektif.

Bagi Rhodes, *governance* pada dasarnya adalah tentang jaringan kebijakan (*policy networks*) yang mengatur dirinya sendiri (*self-organizing networks*). Jaringan kebijakan adalah kumpulan organisasi (pemerintah, swasta, komunitas) yang saling terhubung karena mereka saling membutuhkan sumber daya (informasi, dana, legitimasi, keahlian) untuk mencapai tujuan mereka. Kebijakan tidak lagi dibuat oleh satu lembaga, melainkan merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar (*bargaining*), negosiasi, dan interaksi di dalam jaringan ini. Setiap aktor membawa kepentingan dan sumber dayanya masing-

masing ke dalam "permainan". Dalam model ini, peran pemerintah bergeser dari "pendayung" (rowing) yang melakukan semuanya sendiri, menjadi "pengarah" (steering). Pemerintah bertugas untuk memandu, memediasi, dan memfasilitasi interaksi di dalam jaringan agar menghasilkan tujuan publik yang diinginkan, bukan lagi sebagai komandan yang memberi perintah mutlak (Rhodes, 1997).

Dibawah ini merupakan model dari *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008).

Gambar 1.1 Model collaborative governance Ansell dan Gash (2008)



Sumber: Ansell dan Gash (2008)

Terdapat empat tahapan dalam model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), berikut adalah penjelasannya:

1. *Starting condition* (kondisi awal)

Adalah pembentukan awal relasi antar pihak yang ada dengan latar belakang masing - masing yang berbeda. Perbedaan latar belakang antar berbagai aktor pastinya menimbulkan perbedaan sumber daya, baik itu secara pengetahuan informasi, materiil, dan juga immaterial. Selain itu terdapat juga rekam jejak antar berbagai pihak yang akan melaksanakan kolaborasi, apakah sebelumnya antar pihak pernah melakukan kolaborasi atau tidak. Perlunya kepercayaan antar pihak yang terlibat untuk mewujudkan kondisi awal yang bagus. Kondisi awal yang baik berpotensi untuk menciptakan latar belakang kolaborasi yang baik juga.

2. *Facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif)

Kepemimpinan dalam konteks ini adalah yang mampu untuk menciptakan ruang diskusi yang setara antar berbagai pihak. Pemimpin yang fasilitatif berusaha untuk memberdayakan segala kepentingan dan kebutuhan pihak yang terlibat tanpa mencederai sumber daya dan tujuan utama yang telah direncanakan. Terakhir adalah pemimpin yang mampu untuk memediasikan segala keterbutuhan dan permasalahan para aktor yang ada dalam proses kolaborasi.

3. *Institutional design* (desain institusional)

Berisikan segala bentuk aturan prosedural dalam kerja kolaboratif yang dilaksanakan. Aturan dasar ini dapat berisikan mekanisme dalam pengambilan keputusan dan proses manajerialisasi dari kerja kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama. Keterbukaan antar pihak juga menjadi penting dikarenakan proses kolaborasi yang berjalan harus memperhatikan masing – masing aktor berjalan sesuai dengan kesepakatan. Transparansi dari proses kolaborasi kepada semua aktor agar kebijakan yang dijalankan berjalan sesuai rencana.

4. *Collaborative process* (proses kolaborasi)

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam proses kolaborasi, masing – masing pihak sudah dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Ketika proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik di berbagai pihak, akan semakin besar potensi kesuksesan kolaborasi terjadi. Semua tahapan inilah yang dapat mempengaruhi terciptanya *collaborative governance* pada sebuah kebijakan yang telah dibuat atau akan dibuat oleh pemerintah. Namun selain tahapan, terdapat sub-indikator dalam *collaborative governance* yaitu pada *collaborative process* yang memiliki keterkaitan satu sama lain menurut Ansell dan Gash (2008):

1. *Face to face dialog* (dialog tatap muka)

Untuk menciptakan iklim diskusi yang sehat serta berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama ini dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Komunikasi ini dapat membangun hubungan yang kuat diantara berbagai pihak agar tujuan dapat tercapai.

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Kunci dari kolaborasi tentunya adalah kepercayaan, kepercayaan dapat mulai dibangun ketika awal dialog tatap muka. Kepercayaan satu sama lain yang kuat akan membangun hubungan kolaborasi yang memiliki keterikatan

3. *Commitment to process* (berkomitmen kepada proses)

Masing – masing pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, sehingga komitmen dapat terbangun. Menyadari betul bahwa tanpa ada rasa komitmen, tujuan bersama yang ingin dicapai tidak akan bisa dicapai karena tiap aktor memiliki tugas dan tanggung jawabnya.

4. *Sharing understanding* (berbagi pemahaman)

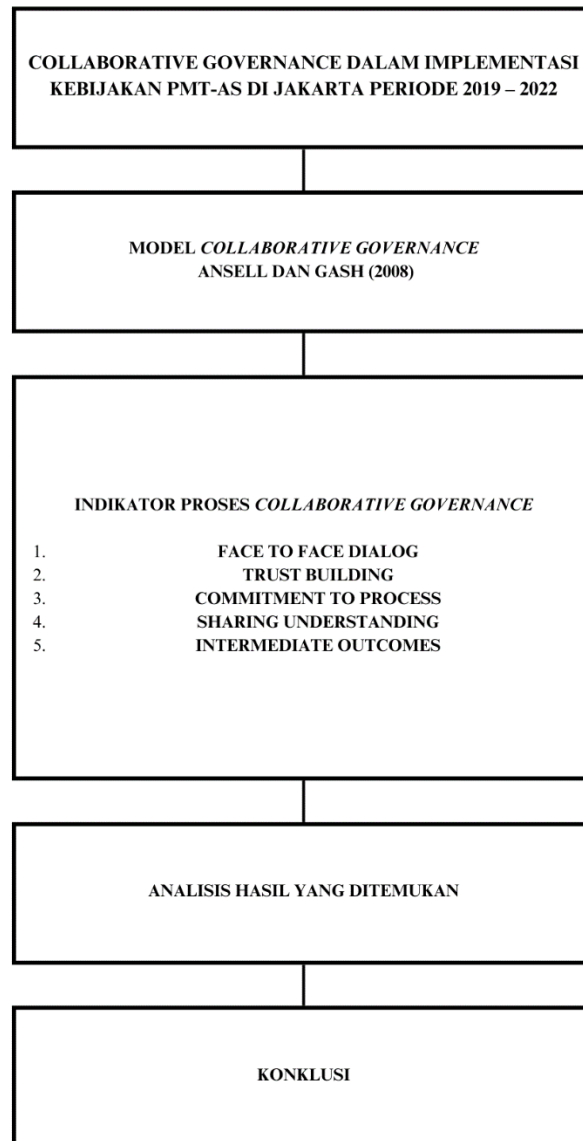
Diskusi terkait apa yang dikerjakan dan berbagi pemahaman kepada yang mungkin belum paham terkait apa yang terjadi, sehingga semua pihak dapat tau permasalahan apa yang terjadi dan tujuan apa yang ingin dicapai. Pihak yang memiliki otoritas harus bisa untuk menerima pemahaman dari pihak yang terlibat lainnya, sehingga diskusi agar semua pihak sepakat dapat menghasilkan solusi yang baik.

5. *Intermediate outcomes* (hasil sementara)

Proses ini dapat menjadi titik evaluasi apa yang perlu diberikan dalam rangka kerjasama yang dibangun. Selain itu pihak yang terlibat dapat melihat sejauh mana proses ini telah dijalankan.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Penelitian ini mengambil fokus *collaborative governance* yang berada pada kebijakan pemberian makanan tambahan anak (PMT-AS) sekolah bagi siswa pendidikan dasar di provinsi Jakarta. Peneliti akan melihat latar belakang

mengapa program ini dirumuskan dan diterapkan di Jakarta, apa yang melatarbelakangi pemerintah provinsi Jakarta sampai harus menggelontorkan dana sebesar itu untuk program makanan tambahan bagi anak sekolah. Setelah itu peneliti akan melihat dari sisi produk hukum yang menjadi landasan utama mengapa kebijakan ini dibuat. Permendagri No. 18 Tahun 2011 menjadi payung utama mengapa kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, lalu oleh pemerintah provinsi Jakarta diterjemahkan atau dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 9 Tahun 2019 ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Setelah menilik dari produk hukum terkait, peneliti akan mulai mengidentifikasi melalui proses kebijakan tersebut dijalankan, hingga akhirnya selesai pada tahun 2022.

Data akan dikumpulkan melalui penelitian yang akan dilakukan pada instansi pemerintahan dan pihak yang terlibat. Setelah mengumpulkan data, lalu akan dianalisis menurut model *collaborative governance* yang telah dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Kerangka berpikir ini juga akan menggunakan teori – teori lainnya yang sesuai pada tema dan keilmuan yang ada pada proposal ini. Penelitian ini akan menjelaskan proses pemerintahan kolaboratif sesuai dengan model teori Ansell dan Gash. Berikutnya, data akan diuji menggunakan indikator dari *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2008). Indikator *collaborative governance* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ansell dan Gash yaitu *face to face dialog*, *trust building*, *commitment to process*, *sharing understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Melalui indikator ini, dapat ditinjau apakah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk kedalam *collaborative governance* menurut indikator tersebut.

Setelah dilakukan pengumpulan data sesuai dengan apa yang ada dalam teori Ansell dan Gash, peneliti akan melakukan analisis pada data yang sudah dikumpulkan dan mengujinya dengan teori yang ada. Pengujian yang dilakukan akan merunut pada kondisi ideal yang direncanakan oleh pemerintah provinsi Jakarta dan kondisi aktual yang terjadi di lapangan khususnya pada sekolah yang menjadi objek utama dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya, peneliti akan mengkonklusikan hasil yang telah ditemukan dan membuat kesimpulan terkait penelitian ini.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pandangan dari W. Lawrence Neuman (2014) dalam bukunya yang berjudul *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* menerangkan bahwa operasionalisasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara konsepsi dalam pemikiran peneliti dengan teori yang berkembang di masyarakat. operasionalisasi menghubungkan secara definisi konseptual dengan teknik, teori, dan prosedur pengukuran. Operasionalisasi dapat berbentuk sebuah survei yang bertujuan untuk mencari data atau dengan cara mengamati proses yang terjadi pada sebuah penelitian. Sehingga ketika sudah melakukan operasionalisasi dalam sebuah penelitian akan melihat proses

yang mencerminkan konstruksi abstrak yang dikonsepskan dalam konseptual pemikiran peneliti (Neuman, 2014).

Peneliti dalam menuliskan penelitian ini membuat operasionalisasi konsep dengan *big theory* dari Ansell dan Gash (2008). Teori dari Ansell dan Gash yang digunakan oleh peneliti adalah model *collaborative governance*.

Tabel 1.1 Tabel Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
Model <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash (2008)	1. <i>Starting condition</i> (kondisi awal)	- Perbedaan sumber daya dan pengetahuan masing – masing pihak - Rekam jejak kerjasama antar pihak
	2. <i>Facilitative leadership</i> (kepemimpinan fasilitatif)	- Memfasilitasi diskusi antar pihak yang terlibat - Mediasi yang diperlukan - Pemberdayaan

	3. <i>Institutional design</i> (desain kelembagaan)	- Kejelasan aturan dasar - Inklusivitas partisipan dari antar pihak - transparansi proses kolaborasi yang ingin dijalankan
	4. <i>Collaborative process</i> (proses kolaborasi)	- Dialog tatap muka - Membangun kepercayaan - Komitmen dalam proses kolaborasi - Pemahaman bersama - Hasil sementara

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan diambil oleh peneliti berjenis penelitian kualitatif. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2018) dalam bukunya yang berjudul *The SAGE Handbook of Qualitative Research* menerangkan

bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bersifat *multi-methods*. Pendekatan ini berfokus pada pendalaman tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya mengkaji sosial dan budaya dengan memperhatikan interpretasi dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian. Kualitatif merupakan pendekatan yang bersifat flexibel dikarenakan peneliti dapat merespons dan memberi pandangan terhadap permasalahan yang terjadi ketika proses penelitian (Denzin & Lincoln, 2018).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini akan mengambil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, selain itu subjek lainnya adalah instansi yang menjadi koordinasi dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta yaitu Suku Dinas Pendidikan yang berada di wilayah Kota Administrasi di Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta juga menjadi subjek penelitian dalam ini, instansi ini adalah yang mengawasi kehygienisan dalam PMT-AS. Pihak selanjutnya adalah pihak yang menjadi pelaksana lapangan yaitu pihak sekolah dan orang tua murid yang tergabung dalam komite sekolah yang berada di area provinsi Jakarta.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer menurut John W. Creswell dan J. David Creswell (2014) mengatakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh

secara langsung dari narasumber atau fenomena yang terjadi ketika kita meneliti. Data primer ini adalah data yang “segar” karena belum tercampur oleh interpretasi sebelumnya. Creswell juga menerangkan untuk mencari data primer harus menggunakan metode pengumpulan data yang baik dan sesuai untuk memastikan data yang dikumpulkan valid serta komprehensif (Creswell & Creswell, 2014).

Sedangkan data sekunder menurut pandangan Sutrisno Hadi (2017) mengatakan bahwa data sekunder merupakan data yang telah dikoleksi oleh pihak lain seperti pemerintah, pusat penelitian, LSM, perusahaan, hingga masyarakat itu sendiri. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghemat ongkos biaya dan waktu penelitian sehingga peneliti bisa langsung menganalisis tanpa harus mengumpulkan data. Namun, data primer harus dikumpulkan dan disaring sebelum dimasukkan kedalam penelitian untuk melihat apakah data tersebut berkualitas dan relevan bagi penelitian yang akan dilakukan (Hadi, 2017).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti akan melakukan beberapa wawancara yang akan ditujukan kepada pihak terkait yang terlibat dalam proses perumusan maupun implementasi dari kebijakan PMT-AS ini. Wawancara diperlukan untuk mengambil data primer yang diketahui oleh aktor yang terlibat dalam kebijakan ini. Khususnya akan

ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta beserta Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dibawahnya sebagai aktor utama dalam kebijakan ini. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Kepada aktor yang menjadi penggerak kebijakan ini seperti sekolah dan orang tua murid yang tergabung pada komite sekolah dalam pelaksanaan kebijakan ini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi juga diperlukan untuk memperkuat data pada penelitian ini. Dokumentasi yang dikumpulkan dapat diambil dari pihak terkait, internet, maupun yang akan didapatkan oleh peneliti ketika terjun langsung ke lapangan.

c. Riset

Pengumpulan data melalui riset yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan kebijakan ini telah selesai dan tidak dilanjutkan. Melalui riset secara mandiri dari internet atau data fisik yang disimpan oleh pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan dari PMT-AS ini.

d. Pengamatan (*observation*)

Pengumpulan data secara terjun langsung ke lapangan tempat kejadian perkara kebijakan itu dilaksanakan.

1.8.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Proses ini merupakan pengolahan dari seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah tulisan ilmiah yang berkualitas. Nantinya data akan disusun secara sistematis dari data yang dikumpulkan melalui teknik pengambilan data, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukannya.

Teknik analisis dan interpretasi data yang akan digunakan oleh peneliti mengambil tiga tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014):

1. Reduksi data

Tahap ini merupakan tahap perangkuman atas apa yang telah didapatkan di lapangan dan memfokuskan terhadap hal – hal yang penting pada temuan penelitian.

2. Penyajian data

Tahap ini akan mengorganisir data dalam bentuk yang dapat dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca. Penyajian data akan berbentuk seperti tabel, matriks, grafik, maupun paragraf yang menyimpulkan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap selanjutnya merupakan identifikasi pola, membuat kesimpulan yang bersifat sementara, dan mengujinya dengan melalui triangulasi lainnya.

Berikut merupakan tahapan dalam identifikasi data menurut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).